



Tahun 2019  
Revisi Berdasarkan  
Permendikbud  
No. 12 Tahun 2018

# RENSTRA

## LPMP Kalimantan Utara

Tahun 2015 - 2019



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat Allah SWT, maka penyusunan Rencana strategis (Renstra) LPMP Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2019 dapat terselesaikan. Penyusunan Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu pengeluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan anggaran. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pemimpin unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah selama ini telah berupaya untuk mewujudkan mutu pendidikan melalui pemikiran teoritis yang sifatnya mendasar yang dipergunakan sebagai landasan dalam menyusun perencanaan pendidikan atau *framework* untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana amanah PERPRES Nomor 14 Tahun 2015 pasal 32 adalah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya bidang peningkatan mutu pendidikan. LPMP Kalimantan Utara sebagai UPT penjaminan mutu pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan mutu pendidikan di propinsi Kalimantan Utara

Maka ditetapkanlah Rencana Strategis LPMP Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2019. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategis dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan yang bermutu di Propinsi Kalimantan Utara.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana strategis (Renstra) LPMP Propinsi Kalimantan Utara. Semoga dengan adanya renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kepala,

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan  
Propinsi Kalimantan Utara



Dr. Jarwoko, M.Pd

NIP. 197003191997031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	5
C. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan	6
D. Kondisi Umum	7
E. Potensi dan Permasalahan	13
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN LPMP KALIMANTAN UTARA .....	21
A. Visi	21
B. Misi LPMP Kalimantan Utara	26
C. Tujuan Strategis LPMP Kalimantan Utara	26
D. Sasaran Strategis LPMP Kalimantan Utara	28
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	33
A. Arah Kebijakan dan Strategi	33
B. Kerangka Kelembagaan	49
BAB IV TARGET DAN INDIKATOR KINERJA LPMP KALIMANTAN UTARA .....	54
A. Target dan Indikator Kinerja	54
B. Penilaian Kinerja	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	63
A. Matrik Kinerja Tahun 2015-2019 LPMP Kalimantan Utara	63
B. Matrik Pendanaan Tahun 2015 - 2019 LPMP Kalimantan Utara	63

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 memuat janji kemerdekaan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk didalamnya anak bangsa, seperti yang terbunyikan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Janji kemerdekaan ini harus ditepati. Janji kemerdekaan ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan dan memajukan kesejahteraan umum. Arti penting pembangunan pendidikan dan kebudayaan juga merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Kemdikbud menetapkan arah pembangunan pendidikan pada empat periode rencana pembangunan bidang pendidikan jangka menengah. Periode 2005-2009

diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2010-2014 diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2015-2019 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat regional. Periode 2020-2024 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat Internasional.

Sejalan dengan amanat konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam “Nawacita” berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (3) Melakukan revolusi karakter bangsa; (4) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pengaturan operasional untuk mewujudkan Nawacita dan hak memperoleh pendidikan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan turunan lainnya, dalam visi, misi, maupun program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana strategis, dan program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019, yang menjadi salah satu komponen penunjang pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

Mutu pendidikan tersebut merupakan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana amanah Pasal 1 Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009. Pengertian mutu mencakup *input, proses, dan output pendidikan*. *Input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. *Input* sumberdaya meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya selebihnya. *Proses pendidikan* merupakan berubahnya *sesuatu* menjadi *sesuatu yang lain*. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedang sesuatu dari hasil proses disebut *output*.

LPMP Kalimantan Utara menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ke dalam Renstra LPMP. Renstra LPMP disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan *performance-based budgeting* sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan. Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk

menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci yang merupakan bisnis proses dalam menghasilkan output. Selain itu Rencana strategis juga memuat hal-hal yang terkait dengan perubahan internal yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendikbud No 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Perubahan ini terkait dibentuknya LPMP Kalimantan Utara yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam Permendikbud No 14 Tahun 2015, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di LPMP Kalimantan Utara.

## **B. Landasan Hukum**

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana Strategis K/L) 2015—2019;
10. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
11. Permendikbud Nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Permendikbud no 12 tahun 2018); dan

12. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau

### C. **Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan**

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil mutu satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan. Fasilitas pemenuhan 8 SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan mutu pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

Mengingat peningkatan mutu merupakan bagian penting dan strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka LPMP mempunyai keterkaitan dengan unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dengan Dinas Pendidikan di Propinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan terhadap hal berikut:

1. *Core Programme*, yaitu kegiatan utama dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
2. *Extended Programme*, yaitu program-program direktorat yang dapat disinkronkan dengan LPMP, antara lain Pendampingan K-13 dan monev, sekolah model/sekolah rujukan/sekolah Pembina, dll;
3. Pengembangan kapasitas, diantaranya :
  - a) Kapasitas kelembagaan mengkaji ulang kebutuhan gedung disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi LPMP, dan
  - b) Pengembangan kapasitas SDM, dengan melakukan pemetaan kompetensi, peningkatan kompetensi, pembinaan pola karir dan lain sebagainya

#### D. Kondisi Umum

LPMP Kalimantan Utara dibangun atas dasar kebutuhan daerah akan adanya sebuah lembaga yang dapat memberikan bantuan pengawasan dan kendali terhadap layanan mutu pendidikan di provinsi Kalimantan Utara. Di nama lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam memberikan program-program yang dapat difasilitasi pelaksanaan maupun pengawasannya ketercapaian program, sehingga pelayanan mutu dalam satuan pendidikan di daerah sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat Kalimantan Utara.

##### *Data Satuan Pendidikan di Kalimantan Utara*

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun data dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, terdapat jumlah sekolah di 5 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Gambaran Data Sekolah di Kalimantan Utara (\*)**

No	Wilayah	Total		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kabupaten Bulungan	201	31	232
2	Kabupaten Nunukan	177	48	225
3	Kabupaten Malinau	155	11	166
4	Kabupaten Tana Tidung	39	3	42
5	Kota Tarakan	67	45	112
	<b>Total Sekolah</b>	<b>639</b>	<b>138</b>	<b>777</b>

(\*) sumber data : [referensi.data.kemdikbud.go.id](http://referensi.data.kemdikbud.go.id)

1. Gambaran Data Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI

**Tabel 1.2. Gambaran data SD di Kalimantan Utara (\*)**

No	Wilayah	Total		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kabupaten Bulungan	132	11	143
2	Kabupaten Nunukan	124	22	146
3	Kabupaten Malinau	102	4	106
4	Kabupaten Tana Tidung	27	2	29
5	Kota Tarakan	47	21	68
	<b>Total Sekolah</b>	<b>432</b>	<b>60</b>	<b>492</b>

2. Gambaran Data Sekolah Jenjang Pendidikan SMP/MTS

**Tabel 1.3. Gambaran data SMP di Kalimantan Utara (\*)**

No	Wilayah	Total		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kabupaten Bulungan	53	11	64
2	Kabupaten Nunukan	38	14	52
3	Kabupaten Malinau	34	3	37
4	Kabupaten Tana Tidung	8	1	9
5	Kota Tarakan	13	12	25
	<b>Total Sekolah</b>	<b>146</b>	<b>41</b>	<b>187</b>

3. Gambaran Data Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/MA

**Tabel 1.4. Gambaran data SMA di Kalimantan Utara (\*)**

No	Wilayah	Total		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kabupaten Bulungan	10	7	17
2	Kabupaten Nunukan	10	9	19
3	Kabupaten Malinau	16	3	19
4	Kabupaten Tana Tidung	3	0	3
5	Kota Tarakan	4	7	11
	<b>Total Sekolah</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>69</b>

4. Gambaran Data Sekolah Jenjang Pendidikan SMK

**Tabel 1.5. Gambaran data SMK di Kalimantan Utara**

No	Wilayah	Total		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kabupaten Bulungan	6	2	8
2	Kabupaten Nunukan	5	3	8
3	Kabupaten Malinau	3	1	4
4	Kabupaten Tana Tidung	1	0	1
5	Kota Tarakan	3	5	8
	<b>Total Sekolah</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>

5. Gambaran Data Sekolah SDLB/SMPLB/SMALB

**Tabel 1.6. Gambaran data SLB di Kalimantan Utara**

No	Uraian	Total		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Siswa	341	0	341
2	Guru	46	0	46
3	Kepala Sekolah	4	0	4
4	Rombel	81	0	81
5	Sekolah	4	0	4
6	Ruang Kelas	49	0	49
7	Lulusan	6	0	6
8	Siswa baru	69	0	69

*Sumber data: Sekretariat Jendral Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud  
(Modul Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB))*

6. Gambaran Data Sekolah PAUDI/TK

**Tabel 1.7. Gambaran data PAUDI di Kalimantan Utara**

No	Wilayah	Total		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kabupaten Bulungan	8	40	48
2	Kabupaten Nunukan	2	39	41
3	Kabupaten Malinau	2	35	37
4	Kabupaten Tana Tidung	1	6	7
5	Kota Tarakan	4	55	59
	<b>Total Sekolah</b>	<b>17</b>	<b>175</b>	<b>192</b>

*Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kalimantan Utara*

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota), jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Kalimantan Utara sejumlah sebagai berikut:

**Tabel 1.8. Gambaran Data Guru di Kalimantan Utara**

No	Wilayah	Total				
		Guru PNS	SD	SMP	SMA	SMK
1	Kabupaten Bulungan	2396	1308	613	255	208
2	Kabupaten Nunukan	2572	1496	557	300	210
3	Kabupaten Malinau	1889	1062	453	296	71
4	Kabupaten Tana Tidung	535	321	132	82	0
5	Kota Tarakan	2241	1178	543	235	268
	<b>Total</b>	<b>9633</b>	<b>5365</b>	<b>2298</b>	<b>1168</b>	<b>757</b>

*Sumber data: [referensi.data.kemdikbud.go.id](http://referensi.data.kemdikbud.go.id)*

7. Gambaran Data Kepala Sekolah di Kalimantan Utara

**Tabel 1.9. Gambaran data Kepala Sekolah di Kalimantan Utara**

No	Wilayah	Total					Jumlah
		TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	SMK	
1	Kabupaten Bulungan	0	143	64	17	8	232
2	Kabupaten Nunukan	41	146	52	19	8	266
3	Kabupaten Malinau	37	106	37	19	4	203
4	Kabupaten Tana Tidung	7	29	9	3	1	49
5	Kota Tarakan	59	68	25	11	8	171
	<b>Total Sekolah</b>	<b>144</b>	<b>492</b>	<b>187</b>	<b>69</b>	<b>29</b>	<b>921</b>

8. Gambaran Data Pengawas Sekolah di Kalimantan Utara

**Tabel 1.10. Gambaran data Pengawas Sekolah di Kalimantan Utara**

No	Wilayah	Total					Jumlah
		TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	SMK	
1	Kabupaten Bulungan	0	14	14	5	2	35
2	Kabupaten Nunukan	0	22	5	3	1	31
3	Kabupaten Malinau	0	11	5	1	1	18
4	Kabupaten Tana Tidung	0	6	2	1	0	9
5	Kota Tarakan	0	7	7	3	4	21
	<b>Total Sekolah</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>114</b>

### *Data Capaian SNP*

Berdasarkan data dari Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui website PMP Kemdikbud, dalam tahun 2018 hasil capaian mutu di Kalimantan Utara sebagai berikut:

**Tabel 1.11. Capaian mutu SNP Satuan Pendidikan di Kalimantan Utara**

No	Wilayah	Rerata Capaian SNP*			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	Kabupaten Bulungan	5.20	5.17	5.40	5.17
2	Kabupaten Nunukan	5.43	5.27	5.49	5.36
3	Kabupaten Malinau	5.24	5.49	4.96	5.22
4	Kabupaten Tana Tidung	5.30	5.44	5.53	0
5	Kota Tarakan	5.49	5.47	5.53	5.23
	<b>Total Capaian</b>	<b>26.66</b>	<b>26.84</b>	<b>26.91</b>	<b>20.98</b>
	<b>Rerata Capaian</b>	<b>5.332</b>	<b>5.368</b>	<b>5.382</b>	<b>4.196</b>

Berdasarkan hasil tabel 1.11, satuan pendidikan di provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pencapaian SNP 3 dengan rentang rata-rata capaian sekitar 5.3. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan lebih lanjut dalam pencapaian 8 SNP. Berikut capaian 8 SNP yang dijelaskan dalam tabel 1.12.

**Tabel 1.12. Rerata capaian mutu 8 SNP Tahun 2018**

No	Standar National Pendidikan SNP	Rerata Capaian SNP*			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	6.18	6.29	6.38	6.37
2	Standar Isi (SI)	5.58	5.61	5.39	5.42
3	Standar Proses (SP)	6.37	6.34	6.39	6.49
4	Standar Penilaian (SPn)	5.79	5.85	5.94	6.06
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK)	3.63	3.25	3.44	3.32
6	Standar Sarana dan Prasarana (SPras)	3.76	3.77	4.12	2.94
7	Standar Pengelolaan (SPeng)	5.66	5.66	5.67	5.83
8	Standar Pembiayaan (SPemb)	5.63	5.59	5.44	5.55
	<b>Total Capaian</b>	<b>42.6</b>	<b>42.36</b>	<b>42.77</b>	<b>41.98</b>
	<b>Rerata Capaian</b>	<b>5.325</b>	<b>5.295</b>	<b>5.34625</b>	<b>5.2475</b>

## E. Potensi dan Permasalahan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Pusat di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki potensi, yang seyogyanya dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan pendidikan. Mengacu kepada Rencana Strategis Dirjen Dikdasmen dan Kemdikbud Tahun 2015-2019, beberapa potensi yang bisa menjadi perhatian, antara lain:

1. Lingkungan Strategis Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud, antara lain:
  - a) Perekonomian Kaltara pada triwulan IV 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kaltara diperkirakan berada dalam range sebesar 7,10% - 7,50% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, meningkatnya ekonomi Kaltara bersumber dari peningkatan kinerja lapangan usaha pertambangan dan konstruksi. Secara kumulatif tahunan, ekonomi Kaltara tahun 2018 diperkirakan tetap akan tumbuh positif meskipun tidak sekuat tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kaltara diperkirakan berada dalam range sebesar 5,80% - 6,20% (yoy). Melambatnya kinerja lapangan usaha pertambangan dipengaruhi oleh level kenaikan harga yang tidak setinggi tahun sebelumnya menjadi faktor utama perlambatan ekonomi Kaltara tahun 2018. Inflasi Kaltara tahun 2018 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat inflasi Kaltara pada tahun 2018 diperkirakan berada pada range 3,40% – 3,80% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi Kaltara tahun 2018 disebabkan kenaikan harga pada kelompok transportasi dan bahan makanan.
  - b) Penduduk usia kerja (*working age population*) di Provinsi Kalimantan Utara menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2018 tercatat berjumlah sekitar 503.147 orang. Bila dirinci menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 271.249 orang atau sekitar 53,91 persen dari total penduduk usia kerja di Kalimantan Utara. Jumlah tersebut lebih banyak bila dibanding dengan penduduk usia kerja Perempuan yang tercatat sebanyak 231.898 orang (sekitar 46,09 persen), dengan rasio jenis

kelamin sebesar 116,97 persen yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk usia kerja perempuan sebanding dengan sekitar 116–117 penduduk usia kerja laki-laki.

- c) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Utara adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Kalimantan Utara. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak politik (*Political Rights*) dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metode IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2). Review dokumen (Perda, Pergub, Dll), (3). *Focus Group Discussion* (FGD) dan (4) Wawancara Mendalam. IDI Kalimantan Utara tahun 2018 sebesar 81,07, dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 81,06. Capaian kinerja demokrasi Kalimantan Utara tersebut tetap pada kategori “baik”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “Baik” (indeks lebih dari 80), “sedang” (indeks antara 60 – 80), dan “Buruk” (indeks kurang dari 60). Perubahan angka IDI Kalimantan Utara dari 2017 ke 2018 dipengaruhi 3 aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan sipil yang turun 1,21 poin (dari 98,57 menjadi 97,36), (2) Hak-hak politik yang naik 7,26 poin (dari 68,54 menjadi 75,80), dan (3) Lembaga demokrasi yang turun 9,98 poin (dari 78,93 menjadi 68,95).
- d) Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) yang sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktifitas masyarakatnya. Bonus demografi diartikan secara sederhana adalah peluang (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif. Data menunjukkan 70% dari total jumlah penduduk kita adalah usia angkatan kerja, namun kualitasnya masih relatif rendah sehingga berdampak pada pasar tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja Indonesia bisa kalah bersaing dengan tenaga kerja asing yang lebih terampil. “Kualitas dan keahlian yang dimiliki tenaga kerja kita masih sangat minim sehingga dapat sulit memiliki daya saing. Indonesia saat ini

menghadapi persoalan yang cukup pelik terkait kependudukan terutama rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di usia produktif. Karena era globalisasi memiliki tuntutan tinggi bagi tenaga kerja. Jika masyarakat usia angkatan kerja tidak mampu bersaing, maka sulit bagi mereka untuk mendapat pekerjaan. Kehidupan perekonomian akan terganggu. Kemiskinan juga akan meningkat sejalan dengan rendahnya kualitas pendidikan usia angkatan kerja. Peningkatan kompetensi yang relevan dengan permintaan dunia kerja agar Indonesia dapat mengambil keuntungan dari bonus demografi. Tidak kalah pentingnya adalah mengubah karakter seperti *soft skill*, *life skill* dan etos kerja. Untuk usia yang akan masuk pasar kerja harus disiapkan sejak dini agar menjadi manusia yang sehat, cerdas dan produktif.

- e) Kondisi jati diri Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan bergotong royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup. Peran bahasa dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penerapan nilai-nilai budaya.

2. Permasalahan dan Tantangan LPMP Kalimantan Utara  
Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2018 di Kalimantan Utara telah menunjukkan keberhasilan yang nyata, yang ditunjukkan dengan angka partisipasi kasar yang menurun. Namun demikian permasalahan di bidang pendidikan tetaplah ada. Diharapkan dengan terbentuknya LPMP Kalimantan Utara dapat semakin mencapai keberhasilan pendidikan.

- Permasalahan pembangunan pendidikan, yang perlu mendapat perhatian antara lain;

- Peran pelaku pembangunan pendidikan belum optimal, seperti keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Peran orang tua lebih pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi anak, di jenjang yang lebih tinggi pembelajaran tidak menjadikan anak sebagai subjek hanya sebagai penerima pembelajaran. Pendidik lebih banyak mementingkan peningkatan mutu, kompetensi dan profesionalisme semata pada kelengkapan administrasi yang dikolektif.
- Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas belum maksimal, meskipun capaian APK pendidikan dasar Kalimantan Utara dari tahun 2010 s.d. 2018 reratanya 74.39%, dengan indeks peningkatan dari tahun 2010 s.d 2018 adalah 105.24, yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan APK dalam 7 tahun terakhir dan sejak terbentuknya provinsi Kalimantan Utara. Dari sisi spasial 5 Kab/Kota memiliki APM di bawah 60%.
- Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal, kualitas pembelajaran di Kalimantan Utara yang diukur melalui hasil pelaksanaan ujian nasional, rerata hasil ujian nasional tahun 2017 hingga 2018 provinsi Kalimantan Utara memiliki rerata tertinggi, misalnya untuk nilai UN tingkat SMP sebesar 49.29 dan 49.86 di tahun 2019. Nilai rata-rata ini berada dibawah 1 point dari nilai rerata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan di wilayah Kalimantan Utara mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Faktor penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran, yaitu rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, lemahnya pelaksanaan kurikulum, dan lemahnya sistem penilaian pendidikan.
- Peningkatan management guru, pendidikan keguruan dan reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dalam peningkatan manajemen guru kendala yang dihadapi antara lain jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah di wilayah. Pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T yang sulit dipenuhi karena keterbatasan guru. Wilayah Kalimantan Utara lebih didominasi dengan daerah 3T, hal ini disebabkan dengan kondisi geografis Kalimantan Utara serta jalur transportasi yang masih belum sampai ke daerah-daerah terpencil. Kualitas, kompetensi dan profesional guru masih harus ditingkatkan, dan kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas.

- Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa, wilayah Kalimantan utara merupakan pintu gerbang bagi masuknya arus masyarakat luar ke wilayah Republik Indonesia, karena berbatasan dengan negara tetangga. Arus masuknya TKI yang mengalami deportasi dan di tampung sementara di wilayah Kalimantan Utara, mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Hal tersebut memunculkan gejala memudarnya pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur budaya bangsa. Gejala ini digambarkan dengan menurunnya kecintaan terhadap produk dalam negeri menunjukkan semakin lemahnya jati diri bangsa dalam menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral dan gotong royong. Karena TKI yang masuk ke wilayah Kalimantan Utara membawa kebiasaan-kebiasaan dan produk-produk dari luar Indonesia.
- Pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien, penerapan anggaran 20% APBN belum dapat sepenuhnya dinikmati masyarakat. Proses penggunaan anggaran pendidikan yang berasal dari APBN melalui mekanisme transfer daerah belum sepenuhnya transparan dan belum berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah. Sedangkan anggaran yang dikelola langsung oleh UPT Kemendikbud melalui kegiatan-kegiatan utama UPT belum bisa optimal menjangkau masyarakat yang berada di wilayah 3T dan berpusat pada pengenalan tugas dan fungsi UPT serta program-program yang bertolak dari tugas utama UPT di daerah. Hampir 80% APBN yang ada di UPT dipergunakan untuk pengenalan dan penyegaran kegiatan-kegiatan penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan melalui sekolah model, sekolah rujukan maupun SPMI dan SPME.
- Belum optimalnya tata kelola organisasi, LPMP Kalimantan Utara yang beroperasi dalam usia 2 tahun, masih dalam tahap penataan organisasi dan penataan uraian jabatan dan tugas setiap pegawai. Dalam periode 2017 s.d 2018 banyak hal yang dilakukan oleh LPMP yang pada akhirnya memerlukan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Terutama dalam tata kelola organisasi, sangat diperlukan bagi setiap pegawai memahami alur pengelolaan organisasi, sehingga kesinambungan kerja dan kinerja setiap bagian dalam LPMP dapat berjalan beriringan sehingga mencapai target kinerja. Ketidaksinambungan dan kurangnya pemahaman tata kelola organisasi antara setiap bagian di LPMP

mengakibatkan nilai SAKIP LPMP Kalimantan Utara berada di urutan terakhir dari semua UPT Kemendikbud, sehingga di tahun 2018 Nilai Kinerja Kemendikbud mengalami penurunan sekitar 1 poin dari nilai kinerja di tahun 2017 yaitu 75.33 dan dapat menyandang kategori Kementerian dengan WTP.

- Tantangan pembangunan pendidikan, berdasarkan tingkat ekonomi di Kalimantan Utara menunjukkan tren positif pada triwulan I tahun 2018, tercatat dalam data di Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kaltara mencapai 5,56 persen. Kemajuan pembangunan manusia Kaltara pada 2017 mengalami percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,92 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang hanya mencapai 0,64 persen. Sedangkan untuk APK dan APM di Kalimantan Utara rata-rata masih dibawah angka Nasional. Sehingga permasalahan yang diuraikan dalam point diatas timbul sebagai akibat kondisi tersebut, upaya yang direncanakan akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Penguatan insan atau pelaku pendidikan pada semua jenjang pendidikan, dengan memotivasi keterlibatan aktif, peningkatan kemampuan, membangun kesadaran akan tanggungjawab dan sinergi peran dalam satu kesatuan ekosistem pendidikan, dan LPMP Kalimantan Utara melakukannya melalui program-program kerja yang melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas.
- Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, dengan pemenuhan hak terhadap pelayanan dasar melalui dana bantuan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses pendidikan menengah melalui penyediaan akses di tingkat kecamatan dan akses bantuan peningkatan mutu bagi pendidik yang berada di daerah 3T.
- Meningkatkan kualitas pembelajaran, penguatan kurikulum dan pelaksanaannya, dan penguatan sistem penilaian pendidikan. Semua ini dilakukan melalui program-program pendampingan, supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, dan pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan yang menjadi tugas utama LPMP.
- Meningkatkan management guru, dengan pemerataan pendistribusian guru diseluruh wilayah, peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru dengan memperkuat sistem uji kompetensi guru dan penilaian guru yang

sahih, dengan melakukan monitoring dan bimbingan teknis pada pengetahuan yang dianggap perlu ditingkatkan.

- Menguatkan karakter siswa dan jati diri bangsa, bagaimana memberikan pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dijadikan landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat pemersatu bangsa. Kalimantan utara memiliki tiga suku besar dan berpengaruh yaitu bulungan, tana tidung dan dayak, yang memiliki adat berbeda-beda, selain itu juga merupakan wilayah dengan masyarakat transmigrasi yang berasal banyak suku di Indonesia. Sehingga sangat diperlukan adanya pemersatu dan perekat bangsa, dan bisa hidup damai.
- Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendidikan yang belum efektif dan efisien, LPMP memiliki tugas utama dalam pemetaan, supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan program mengacu pada kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan dalam melakukan peningkatan kapasitas pelaksanaan pendidikan.
- Memperbaiki tata kelola organisasi kemendikbud, hal ini terkait dengan keberhasilan dan pencapaian kinerja LPMP dalam melaksanakan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, memperkuat manajemen kinerja lembaga dan memperkuat manajemen aparatur sipil negara menjadi aparatur yang memiliki nilai-nilai Kemendikbud.

3. Mutu layanan pendidikan yang dilaksanakan LPMP Kalimantan Utara, mengacu pada target kinerja Kemendikbud meliputi:

**Tabel 1.13. Target Kinerja LPMP Kalimantan Utara**

No	Layanan Mutu LPMP Kalimantan Utara	Satuan	Target Sasaran*)		
			2017	2018	2019
1	Pemetaan Mutu di Satuan Pendidikan semua jenjang pendidikan di daerah	Sekolah	0	464	504
2	Supervisi dan Fasilitasi Pencapaian 8 SNP di semua jenjang satuan pendidikan	Sekolah	0	150	170
3	Fasilitasi Berdasarkan 8 SNP	Sekolah	0	45	59
4	Fasilitasi Pejaminan Mutu melalui Kemitraan	Sekolah	0	24	24
5	Layanan Data dan Informasi yang Akurat, Berkelanjutan, dan Terbaru	Persentase	0	464	504
12	Nilai Minimal SAKIP LPMP Kalimantan Utara	Angka	0	78	79

\*) sumber data: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

4. Permasalahan Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas daerah, pemberdayaan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Berbagai permasalahan di tingkat satuan pendidikan menengah seperti pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran di kelas, kerjasama guru, siswa, orang tua, dan masyarakat lainnya perlu ditumbuhkan melalui lembaga yang berkompeten dalam melakukan pengendalian mutu untuk menuju lembaga sekolah yang kredibel. Pemetaan mutu sekolah dan melihat efektivitas sekolah dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan intervensi kepada satuan pendidikan dalam menyongsong masyarakat ekonomi asia dan meningkatkan daya saing regional.

## BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN LPMP KALIMANTAN UTARA

### A. Visi

Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis 2015-2019, yaitu “***Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong***”. Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan visi yang akan diemban tersebut, ditetapkanlah Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu “***Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong***”

Berdasarkan tugas dan fungsi LPMP, dirumuskan visi LPMP Kalimantan Utara sebagai berikut “***Terbentuknya Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu dengan berlandaskan Gotong Royong***”.

Terbentuknya layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dapat dimaknai sebagai terwujudnya 4 layanan publik yang menjadi bagian dalam tugas utama LPMP Kalimantan Utara.

Empat layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terbentuknya layanan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu pada seluruh jenjang pendidikan sama dan merata;
2. Terwujudnya layanan peran pelaku pendidikan dalam pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan melalui supervisi dan fasilitasi;
3. Terwujudnya layanan data dan informasi peta mutu satuan pendidikan yang berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan;
4. Terwujudnya layanan tata kelola organisasi yang terbuka dan bersih (WBK dan WBBM);
5. Terbentuknya budaya mutu di seluruh jenjang pendidikan.

Kata Bermutu yang dimaksud dalam visi adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang bermutu

Sekolah yang memiliki layanan pendidikan yang meliputi penerimaan siswa yang sesuai dengan peraturan, informasi dan data sekolah yang terbuka, melibatkan masyarakat sekitar, dan membangun budaya mutu di setiap aktivitas sekolah.

2. Guru yang berkualitas

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang terlibat aktif

Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

4. Masyarakat yang sangat peduli

Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

5. Pemerintah yang berperan optimal

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua jenjang pendidikan Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta

mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten dan kota serta antardaerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah.

*Berlandaskan gotong royong* dapat dimaknai sebagai berikut: Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

Standar moral yang menjadi prinsip kinerja seluruh warga LPMP Kalimantan Utara berpatokan pada tata nilai sebagai berikut:

1. Tata Nilai Masukan, meliputi;

Nilai-nilai masukan (*input values*), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai LPMP Kalimantan Utara dalam rangka mencapai keunggulan, yakni;

**Tabel 2.1. Nilai-nilai masukan (*input values*)**

No	Komponen	Pengertian
1	Empati	Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain
2	Beriman dan Bertaqwa	Pekerjaan menjadi suatu amanah dan ibadah, mempunyai moral dan etika, berbudi luhur dan bermartabat
3	Tanggap dan Peduli/Responsif	Cepat bertindak/cekatan, bermotivasi, melakukan tindakan berdasarkan asas manfaat, futuristik, adaptif
4	Integritas	Jujur dan dapat dipercaya, berwibawa, karismatik, inspiratif, teladan, sabar, bertanggung jawab dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak

No	Komponen	Pengertian
5	<i>Reliable</i> /Terpercaya	Inovatif dan kreatif, cermat dan teliti, memiliki sifat objektif dan disiplin
6	<i>Entrepreneurship</i>	Visioner, intuitif, berhasil guna, berani mengambil resiko dan mengoptimalkan sumber daya yang ada

2. Tata Nilai Proses, meliputi;

Nilai-nilai proses (process values), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di LPMP Kalimantan Utara, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan.

**Tabel 2.2. Nilai-nilai proses (*process value*)**

No	Komponen	Pengertian
1	Taat Asas	Prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan/tugas
2	Kondusif	Memiliki budaya kerja yang sehat dan mandiri, transparan, komunikatif, demokratis, <i>team work</i> , <i>shared vision</i> , <i>self-belonging</i> dan loyalitas
3	Kompetensi	Bekerja berdasarkan keahlian ( <i>the right man in the right place</i> )
4	Perbaikan Berkelanjutan	Terus melakukan perbaikan standar dan mengikuti kecenderungan/tren perubahan sains dan teknologi
5	Sistematis	Runut (berurutan), efektif, efisien dan tersistem
6	Kolaborasi	Membangun kemitraan dan kerja sama

3. Tata Nilai Keluaran, meliputi;  
 Nilai-nilai keluaran (*output values*), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para *stakeholders* (Unit Utama Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah Daerah, DPRD, Pegawai, Donatur, Dunia Pendidikan, Masyarakat lainnya)

**Tabel 2.3. Nilai-nilai keluaran (*output values*)**

No	Komponen	Pengertian
1	Akuntabilitas	Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif
2	Tata Kelola	Tertib administrasi/sesuai dengan prosedur dan peraturan
3	Pencitraan Publik	Transparan, komunikatif dan terpercaya
4	Pelayanan Prima	Handal dan mampu menjadi <i>one-stop service</i>
5	Profesional	Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dalam arti berkompetensi, menjadi teladan, terpercaya, sistematis

Selain dari standar moral yang dianut setiap warga LPMP Kalimantan Utara, adapula standar kinerja yang menjadi capaian utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Standar kinerja yang dimaksudkan adalah visi dan misi LPMP Kalimantan Utara yang merupakan acuan yang diperlukan oleh setiap pegawai di LPMP Kalimantan Utara, sesuai dengan sasaran kerja yang direncanakan menurut peta jabatan dalam setiap unit kerja di LPMP Kalimantan Utara. Sedangkan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan yang menjadi tugas utama LPMP Kalimantan Utara merupakan aktifitas Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dan diperbaharui kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk mendorong satuan pendidikan dalam upaya pencapaian atau pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Aktifitas penjaminan mutu pendidikan yang dimaksudkan terintegrasi dalam proses bisnis penjaminan mutu pendidikan melalui berbagai kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Supervisi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan yang didukung oleh pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Mutu Pendidikan.

## B. Misi LPMP Kalimantan Utara

Dalam rangka mencapai visi ini, ada 4 (empat) misi yang harus diemban oleh LPMP Kalimantan Utara dalam rentang waktu 2018-2019, yaitu:

**Tabel 2.4. Misi LPMP Kalimantan Utara**

<b>Kode</b>	<b>Misi</b>
M1	Mewujudkan Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berstandar Moral dan Berkinerja Tinggi
M2	Meningkatkan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Meningkatkan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk menuju Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang berbudaya mutu
M4	Meningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

## C. Tujuan Strategis LPMP Kalimantan Utara

Tujuan strategis LPMP Kalimantan Utara tahun 2018-2019 mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan strategis tersebut adalah:

**Tabel 2.5. Tujuan Strategis LPMP Kalimantan Utara tahun 2018-2019**

<b>Kode</b>	<b>Tujuan Strategis</b>
T1	Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan pendidikan
T2	Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil
T3	Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu dengan Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi
T4	Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Tujuan strategis ini untuk memastikan satuan pendidikan di wilayah provinsi Kalimantan Utara mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu melalui penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan tanpa ada diskriminasi akses dan geografis. Kegiatan yang dilaksanakan LPMP Kalimantan Utara di tahun 2019 diarahkan untuk mencapai tujuan strategis ini.

Penjabaran dari tujuan strategis tersebut adalah;

1. Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan pendidikan. Peran LPMP Kalimantan Utara sebagai unit pelaksana teknis kementerian yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, fasilitasi, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam upaya penjaminan mutu satuan pendidikan, sehingga mencapai standar nasional pendidikan. Peran strategis pengawas perlu dikuatkan melalui berbagai kegiatan untuk memastikan kapasitas pengawas meningkat dalam mendampingi sekolah binaannya untuk melaksanakan proses penjaminan mutu. Kepala sekolah dan guru merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Utara selama tahun 2018-2019 akan bermuara pada aktifitas penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dengan pelaku utamanya adalah pengawas, kepala sekolah dan guru.
2. Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil. Sejalan dengan “**Nawacita**” kabinet kerja yang merupakan arah prioritas kebijakan pembangunan pada poin ketiga untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan maka LPMP Kalimantan Utara bertujuan untuk memprioritaskan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadi sasaran program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan. Sehingga pemerataan kualitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan sesuai tujuan direktorat Dikdasmen akan terwujud di provinsi Kalimantan Utara
3. Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu dengan Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi Layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh

LPMP Kalimantan Utara dalam tahun 2019 difokuskan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atas layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan dan pembelajaran yang berkualitas. Standar moral dan kinerja yang dimiliki oleh seluruh pegawai LPMP menjadi modal dasar bagi LPMP Kalimantan Utara untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai standar yang ditetapkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atas layanan penjaminan mutu pendidikan.

4. Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk menjaga agar, (a) mutu laporan keuangan tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (b) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat provinsi. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi LPMP Kalimantan Utara yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset dan bukti lapangan.

**D. Sasaran Strategis LPMP Kalimantan Utara**

Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran strategis kegiatan yang harus dicapai sampai tahun 2019 dari setiap tujuan strategis tersebut, sehingga menjadi target yang harus dicapai dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah selama 1 tahun kedepan. Adapun sasaran kegiatan LPMP Kalimantan Utara tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan pendidikan, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

**Tabel 2.6. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis T1**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>
SS1	Meningkatnya peran pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase pengawas sekolah kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam pelaksanaan penjaminan mutu,</li><li>• Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.</li><li>• Indeks efektivitas satuan pendidikan yang melaksanakan penjaminan mutu meningkat 80 persen</li></ul>

Pencapaian tujuan strategis meliputi satu sasaran strategis yaitu meningkatnya peran pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang terlaksana dengan pencapaian tiga indikator kinerja yang menjadi dasar dalam penyusunan program di LPMP Kalimantan Utara.

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil, terpenuhi dengan tercapainya indikator sasaran strategis berikut:

**Tabel 2.7. Sasaran strategis dan Indikator kinerja sasaran strategis T2**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>
SS1	Meningkatnya akses layanan mutu pada daerah 3 T	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase satuan pendidikan yang terfasilitasi berdasarkan 8 SNP,</li><li>• Persentase satuan pendidikan pada daerah 3T terfasilitasi mutu pendidikannya.</li><li>• Indeks efektivitas satuan pendidikan yang terfasilitasi berdasarkan 8 SNP meningkat 80 persen.</li></ul>

Tujuan strategis 2 dengan tercapainya sasaran strategis meningkatnya akses layanan mutu di daerah terpencil, Pencapaian ini melalui tiga indikator kinerja yang termuat dalam program LPMP Kalimantan Utara sebagai output selanjutnya. Pemetaan mutu, supervisi dalam pencapaian standar nasional dan fasilitasi dalam rangka peningkatan mutu yang dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Utara pada satuan pendidikan termasuk satuan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mewujudkan adanya pemerataan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan. Peningkatan jumlah satuan pendidikan menjadi target yang harus dipenuhi sesuai target kinerja

kegiatan LPMP Kalimantan Utara. Indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan ini adalah 80% satuan pendidikan di setiap jenjang telah dilakukan pemetaan, supervisi dan fasilitasi.

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu dengan Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi.

**Tabel 2.8. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis T3**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS1	Meningkatnya pembelajaran yang bermutu melalui layanan penjaminan mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase satuan pendidikan yang terfasilitasi pencapaian 8 SNP,</li> <li>• Persentase satuan pendidikan yang tersupervisi pencapaian 8 SNP.</li> <li>• Indeks efektivitas pemetaan mutu satuan pendidikan meningkat 80 persen.</li> </ul>

Melalui tujuan strategis ini diharapkan selama tahun 2018-2019 diharapkan seluruh pegawai LPMP Kalimantan Utara dengan standar moral dan standar kinerja yang tinggi diharapkan dapat memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang menitikberatkan pada kepuasan pelanggan. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Indeks kepuasan pengguna layanan penjaminan mutu pendidikan mencapai 85%.

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4): Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan.

**Tabel 2.9. Sasaran strategis dan Indikator kinerja sasaran strategis T4**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja lembaga	Skor SAKIP LPMP Kalimantan Utara
SS2	Menuju Opini lembaga wilayah bebas dari korupsi (WBK)	Laporan kinerja lembaga yang memenuhi opini WBK
SS3	Meningkatnya layanan publik dalam data dan informasi mutu pendidikan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi sebesar 60

Peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan diharapkan dapat mewujudkan birokrasi LPMP Kalimantan Utara yang dapat menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif,

dan efisien. Performace atau kinerja pengelola kegiatan menjadi sangat penting bagi terciptanya tata kelola yang diinginkan tersebut. Indikator keberhasilan ditetapkan dengan Tercapainya hasil audit “*Wajar Tanpa Pengecualian*”.

Berdasarkan uraian tujuan strategis dan sasaran strategis serta indikator kinerja strategis yang menjadi acuan dalam penyusunan program di LPMP Kalimantan Utara menjadi ukuran keberhasilan dan pencapaian kinerja lembaga.

**Tabel 2.10. Keterkaitan antara tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indiktaor kinerja kegiatan**

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis
1	Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan pendidikan	Meningkatnya peran pengawas, kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pengawas sekolah kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam penjaminan mutu,</li> <li>• Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.</li> <li>• Indeks efektivitas satuan pendidikan yang melaksanakan penjaminan mutu meningkat 80 persen</li> </ul>
2	Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil	Meningkatnya akses layanan mutu satuan pendidikan berupa data dan informasi yang terbaru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya,</li> <li>• Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan akses layanan mutu.</li> <li>• Indeks efektivitas satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya.</li> <li>• Indeks efektivitas satuan pendidikan yang mendapatkan akses layanan data mutu.</li> </ul>
3	Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi	Meningkatnya pembelajaran yang bermutu melalui layanan penjaminan mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase satuan pendidikan yang terfasilitasi berdasarkan 8 SNP,</li> <li>• Persentase satuan pendidikan tersupervisi berdasarkan 8 SNP.</li> <li>• Indeks efektivitas satuan pendidikan yang terfasilitasi berdasarkan 8 SNP meningkat 80 persen.</li> <li>• Indeks efektivitas satuan pendidikan yang tersupervisi berdasarkan 8 SNP meningkat</li> </ul>

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis
4	Peningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya akuntabilitas kinerja lembaga</li> <li>• Menuju Opini lembaga wilayah bebas dari korupsi (WBK)</li> <li>• Meningkatnya layanan publik dalam data dan informasi mutu pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor SAKIP LPMP Kalimantan Utara</li> <li>• Laporan kinerja lembaga yang memenuhi opini WBK</li> <li>• Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi sebesar 60</li> </ul>

Berdasarkan dari indikator kinerja ini, maka target atau capaian output yang akan dihasilkan merupakan terpetakannya pelaku pendidikan di satuan pendidikan yang disupervisi dan difasilitasi melalui sekolah sasaran penjaminan mutu (SPMI), terpetakannya mutu satuan pendidikan melalui analisis rapor mutu, supervisi dan fasilitasi pencapaian 8 SNP dan terlaksanakannya layanan publik pendidikan yang dibuktikan dengan indeks kepuasan pelanggan serta terwujudnya instansi yang WTP, ZI-WBK dan WBBM.

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi**

#### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Arah kebijakan dan strategi nasional adalah penugasan RPJM kepada Kemendikbud, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemendikbud bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud.

Arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 ialah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam kerangka pembangunan yang dapat memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Perekonomian Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi yang menggandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai bahan mentah, tenaga kerja murah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas istek yang relatif rendah menjadi perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, industri pengolahan dan jasa yang didukung oleh manusia berkualitas, dan mempunyai daya saing serta didukung kualitas iptek yang terus meningkat. Kualitas iptek dan manusia yang diukur dengan tingkat pendidikan, merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional ke depan.

Permasalahan pokok yang mendasar dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, dengan luntarnya budaya menghormati keragaman memupuk munculnya sikap-sikap permusuhan, diskriminasi dan tindakan kekerasan di masyarakat, yang diperburuk dengan tergerusnya karakter bangsa akibat kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat telah melahirkan dunia tanpa batas. Adapun tantangan utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam lima tahun ke depan ialah, (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah; serta (ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif.

Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, dan memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan

meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi ialah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan.

Tantangan utama dalam pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional ke depan secara efektif dan efisien.

Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional khususnya kawasan ASEAN. Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih. Bahkan, hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan misalnya konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Untuk memitigasi hal ini, pemerintah menentukan kebijakan dalam memanfaatkan bonus demografi untuk lima tahun ke depan sebagai berikut:

- memperluas pendidikan menengah universal;
- meningkatkan pelatihan keterampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi;
- memperbanyak lembaga pelatihan, dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja;
- meningkatkan kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda; dan
- melakukan pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja.

Strategi pembangunan nasional terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan, di antaranya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak serta mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

Mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan, pembangunan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi dalam pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud diarahkan untuk mencapai sasaran pokok/utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Sasaran pokok pembangunan pendidikan tertuang dalam tabel di bawah ini;

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 thn
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0%
7	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
8	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60

Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagaimana terdapat dalam RPJMN merupakan sasaran komposit dari pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah, dapat terlihat dalam tabel berikut ini;

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Kualitas pelayanan publik: integritas pelayanan publik (pusat)	9.0
2	Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik (Kategori B)	75%
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L	95%
4	Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Skor B)	85%

Jika mengacu pada sasaran pokok yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut;

- Meningkatkan Kualitas Insan yang Berkeadilan Insan yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T, serta meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains dan literasi.
- Menyiapkan Landasan Pembangunan yang Kokoh Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang antara lain, didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien.
- Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah diarahkan menjamin pemenuhan pelayanan dasar, termasuk pelayanan pendidikan dan kebudayaan di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; dan mempercepat pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional mengacu pada sembilan agenda prioritas Nawacita. Khusus yang terkait dalam tugas dan fungsinya Kemendikbud yaitu Nawacita nomor 5, 6, 8, 9, dan 2, yaitu;

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara (1)
- Membuat Pemerintah selalu hadir untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya (2)
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (3)
- Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (4)
- Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (5)
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (6)
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik (7)

- Melakukan revolusi karakter bangsa (8)
- Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (9)

Pembangunan manusia Indonesia merupakan pembangunan pendidikan yang dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang merupakan pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu andalan bagi upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan pendidikan periode ini dilakukan, terutama melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Disamping itu, kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat ketersediaan insan terdidik dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015—2019 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kemendikbud pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud juga disusun dengan memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2014. Pertimbangan lain ialah hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2015—2019 didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk

menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Arah kebijakan Kemendikbud selanjutnya dilaksanakan melalui program-program periode 2015—2019. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2015—2019, Kemendikbud menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Struktur program dan unit eselon I yang bertanggung jawab untuk mengelola program dan kegiatan ditunjukkan pada tabel dibawah ini;

No	Program	Eselon I
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sekretariat Jenderal
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	Inspektorat Jenderal
3	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Ditjen Dikdasmen
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Ditjen PAUD dan Dikmas
5	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Penelitian dan Pengembangan
6	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
7	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
8	Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya	Ditjen Kebudayaan

Pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Kemendikbud. IKP ini hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan angka capaian atau angka target pada tahun tertentu.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini bertujuan untuk mencapai:

- peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat;

- peningkatan efektivitas birokrasi serta Tata Kelola Kemendikbud yang bersih dan terpercaya;
- peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Perincian SP dan IKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Sasaran Program	IKP (Indikator Kinerja Program)
1	Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase realisasi sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud,</li> <li>- Tingkat kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud di luar negeri terhadap layanan Atdikbud/DEWATAP UNESCO dan SLN,</li> <li>- Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral bidang dikbud</li> </ul>
2	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) Kemendikbud</li> <li>- Skor SAKIP Kemendikbud</li> </ul>
3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persentase pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi
4	Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, dan tertatanya kelembagaan unit organisasi dan tatalaksana yang efektif di lingkungan kementerian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan,</li> <li>- Persentase kasus dan masalah hukum yang mendapatkan advokasi dan layanan bantuan hukum,</li> <li>- Jumlah unit organisasi yang dilakukan penataan kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Kemendikbud</li> </ul>
5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase peningkatan satuan kerja di lingkungan Kemendikbud yang mendapat layanan TIK,</li> <li>- Persentase peningkatan jumlah satuan pendidikan yang mendayagunakan TIK untuk e-pembelajaran,</li> <li>- Persentase peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi TIK untuk e-pembelajaran,</li> <li>- Persentase peningkatan e-Layanan yang terintegrasi pada Kemendikbud sesuai dengan Tata Kelola TIK (e-government)</li> </ul>

6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kebudayaan antarnegara ASEAN	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO, Persentase peningkatan akses layanan pendidikan dan kebudayaan antar negara ASEAN
7	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan	Persentase data tervalidasi bidang pendidikan dan kebudayaan, Persentase permintaan layanan data, statistik, dan hasil pendayagunaan data pendidikan dan kebudayaan yang dapat dipenuhi, Persentase pendataan pusat dan daerah yang terintegrasi
8	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan layanan masyarakat	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud, Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif
9	Meningkatnya kualitas film dan iklan film melalui penyensoran dan terwujudnya budaya sensor mandiri	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor, Jumlah pemangku kepentingan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri
10	Meningkatnya kualitas pengembangan perfilman	Jumlah pemberian izin dan pengendalian kegiatan dan usaha perfilman, Jumlah apresiasi dan pemberian penghargaan di bidang perfilman
11	Terselenggaranya urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi Kemendikbud	Indeks kepuasan layanan Setjen
12	Terselenggaranya tata kelola setjen dan pengelolaan BMN kementerian yang akuntabel	Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi
13	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai	Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti diklat aparatur (diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, serta diklat teknis dan fungsional)
14	Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan	Hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud. Perincian SP dan IKP Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

No	Sasaran Program	IKP (Indikator Kinerja Program)
1	Menguatnya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya Opini BPK terhadap Laporan,</li> <li>- Keuangan Kemendikbud WTP,</li> <li>- Tercapainya Skor SAKIP menjadi Memuaskan,</li> <li>- Satker Kemendikbud WBK.</li> </ul>

Program pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun yang dijabarkan sebagai berikut:

- peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, gender, geografis, usia, serta kondisi fisik dan mental;
- peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
- peningkatan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Perincian SP dan IKP Program Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Sasaran Program	IKP (Indikator Kinerja Program)
1	Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APM SD/SDLB,</li> <li>- APK SD/SDLB,</li> <li>- Angka Putus Sekolah SD,</li> <li>- APM SMP/SMPLB,</li> <li>- APK SMP/SMPLB,</li> <li>- Angka Putus Sekolah SMP,</li> <li>- Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP,</li> <li>- Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP),</li> <li>- Rasio APM perempuan:laki-laki di SD,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP,</li> <li>- Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9.</li> </ul>
2	Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APK SMA/SMK/SMLB,</li> <li>- Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK,</li> <li>- Rasio APK perempuan: laki-laki di SMA/SMK,</li> <li>- Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6,</li> <li>- Rata-rata nilai lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun.</li> </ul>
3	Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/SMLB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah siswa jenjang pendidikan menengah penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP),</li> <li>- Angka putus sekolah SMA/SMK</li> </ul>
4	Sekolah menengah di setiap kecamatan pada tahun 2019	Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah
5	Peningkatan kualitas pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B,</li> <li>- Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter),</li> <li>- Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah,</li> <li>- Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP,</li> <li>- Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP,</li> <li>- Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM),</li> <li>- Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM),</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SM menerapkan program penyelarasan dengan dunia kerja</li> </ul>
6	Jumlah sekolah menengah rujukan/model di setiap kabupaten dan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase kabupaten dan kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model,</li> <li>- Persentase SM yang memenuhi akreditasi minimal B</li> </ul>
7	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP
8	Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru,</li> <li>- Nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (baik) pada tahun 2019</li> </ul>

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, program ini bertujuan untuk mencapai sasaran program dengan ditandai tercapainya indikator kinerja program, seperti terinci dalam tabel berikut;

No	Sasaran Program	IKP (Indikator Kinerja Program)
1	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun,</li> <li>- Jumlah lembaga PAUD memenuhi Standar Nasional,</li> <li>- Persentase (%) Kab./Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang menyelenggarakan Holistik Integratif</li> </ul>

2	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan gender dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan/atau kecakapan berwirausaha,</li> <li>- Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional</li> </ul>
3	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Angka melek aksara penduduk usia 15-59 tahun,</li> <li>- Jumlah lembaga PKBM yang memenuhi standar nasional,</li> <li>- Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh pendidikan setara dengan pendidikan dasar dan menengah,</li> <li>- APK Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD Sekurang-kurangnya 0,63 %,</li> <li>- APK Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP Sekurang-kurangnya 3,23 %,</li> <li>- APK Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sekurang-kurangnya 3,21 %</li> </ul>
4	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu, berkesetaraan gender dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga,</li> <li>- Jumlah orang dewasa menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat</li> </ul>
5	Terwujudnya tata kelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, lembaga dan masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua provinsi, kabupaten dan kota	Jumlah Model/Program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan, divalidasi dan diterapkan.

Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, program ini bertujuan untuk mencapai sasaran program yang diwujudkan dalam pencapaian indikator kinerja program seperti tabel berikut:

No	Sasaran Program	IKP (Indikator Kinerja Program)
1	Meningkatnya kualitas dan relevansi hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan mutu bidang pendidikan dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kurikulum, pembelajaran dan perbukuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan</li> <li>- Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang digunakan,</li> <li>- Persentase ketersediaan soal yang terstandar sesuai kebutuhan bank soal nasional Satker Kemendikbud WBK,</li> <li>- Persentase rekomendasi kebijakan arkeologi yang dimanfaatkan untuk pendidikan serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan.</li> </ul>
2	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP),</li> <li>- Persentase program/satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai SNP,</li> <li>- Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan,</li> <li>- Persentase pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai SNP</li> </ul>
3	Penilaian kinerja penelitian dan pengembangan dikategorikan baik/skor SAKIP	Perolehan nilai SAKIP Balitbang

Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, rincian ketercapaian sasaran program dan indikator kinerja program;

No	Sasaran Program	IKP (Indikator Kinerja Program)
1	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan,</li> <li>- Keuangan Kemendikbud WTP,</li> <li>- Tercapainya Skor SAKIP menjadi Memuaskan,</li> <li>- Satker Kemendikbud WBK.</li> </ul>
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya
3	Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Bahasa Terkembangkan,</li> <li>- Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi,</li> <li>- Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</li> </ul>
4	Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya
5	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan,</li> <li>- Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan</li> </ul>
6	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan	Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Program Guru dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk mencapai sasaran program yang ditandai dengan ketercapaian IKP sebagai berikut;

No	Sasaran Program	IKP (Indikator Kinerja Program)
1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari Kompetensi Profesional, Pedagogik, Kepribadian dan Sosial, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase guru bersertifikat pendidik, Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerjanya,</li> <li>- Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru dan tenaga kependidikan,</li> <li>- Persentase guru dan tenaga kependidikan mengikuti peningkatan kompetensi Berkelanjutan, Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar, Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang meningkat karirnya, Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima kesejahteraan.</li> </ul>
2	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata di seluruh kabupaten/kota	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombongan belajar dan standar kurikulum

Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dibidang kebudayaan. Perincian SP dan IKP Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

No	Sasaran Program	IKP (Indikator Kinerja Program)
1	Meningkatnya jumlah pelaku dan pengelola budaya dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan	- Jumlah pelaku dan pengelola budaya dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
2	Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan di bidang kebudayaan	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombongan belajar dan standar kurikulum
3	Meningkatkan peran kebudayaan dalam hubungan antar daerah dan antar bangsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kerjasama kebudayaan antar daerah yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan,</li> <li>- Jumlah kerjasama kebudayaan antar bangsa yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan</li> </ul>
4	Mewujudkan mutu tata kelola kebudayaan yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Kebudayaan meningkat kualitas layanan, manajemen sumberdaya dan tata kelolanya

Arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi acuan, dalam penyusunan rencana strategis LPMP Kalimantan Utara. Arah kebijakan dan sasaran strategis LPMP Kalimantan Utara juga mengacu pada program pendidikan dasar dan menengah yang menjadi tugas pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Rancangan Kebijakan dan sasaran strategi LPMP Kalimantan Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya diturunkan dari arah kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi seperti yang diuraikan dalam tabel di bawah ini;

**Tabel 3.1. Arah kebijakan LPMP Kalimantan Utara**

Arah Kebijakan Ditjen Dikdasmen	Arah Kebijakan LPMP Kalimantan Utara	Strategi
Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar dan Menengah berkualitas	Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh satuan pendidikan dalam mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan teknis dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kepastian layanan penjaminan mutu pendidikan dengan penguatan kapasitas internal personal LPMP dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan.</li> <li>c. Memprioritaskan satuan pendidikan di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal sebagai sasaran program dan kegiatan.</li> </ul>
Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa	Mendorong tumbuhnya budaya mutu di satuan pendidikan melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan.</li> <li>b. Meningkatkan kapasitas pengawas untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan</li> </ul>
Memperkuat jaminan kualitas ( <i>quality assurance</i> ) pelayanan pendidikan	Memperkuat penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan kapasitas kepala sekolah dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan.</li> <li>b. Penguatan kapasitas guru dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan</li> </ul>
Mengembangkan kurikulum	Melakukan supervisi penerapan kurikulum sebagai bagian integral dari penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan	Melakukan integrasi proses pendampingan penerapan kurikulum dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan

Arah Kebijakan Ditjen Dikdasmen	Arah Kebijakan LPMP Kalimantan Utara	Strategi
Memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Memperkuat capaian standar pengelolaan dengan penguatan manajemen berbasis sekolah melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan kapasitas personal LPMP Kalimantan Utara Selatan untuk melakukan pendampingan penerapan MBS sebagai bagian dari pendampingan penjaminan mutu pendidikan.</li> <li>b. Penguatan kapasitas kepala sekolah dalam penerapan MBS melalui supervisi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan</li> </ul>
Memperkuat sistem informasi pendidikan	Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengelolaan data dan informasi mutu pendidikan untuk kebutuhan penjaminan mutu pendidikan.</li> <li>b. Mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan akses layanan data mutu pendidikan.</li> <li>c. Melakukan publikasi hasil pemetaan mutu pendidikan secara berkala dalam sistem informasi mutu pendidikan.</li> </ul>

Penerapan strategi yang ditetapkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan LPMP Kalimantan Utara tidak terlepas dari tata nilai yang menjadi standar moral dan kinerja pegawai LPMP dalam memberikan layanan prima penjaminan mutu pendidikan di provinsi Kalimantan Utara. Program dan kegiatan yang dilaksanakan LPMP Kalimantan Utara untuk pemenuhan visi sesuai misi yang diemban akan diwujudkan dalam kerangka kelembagaan yang kuat dan sistematis.

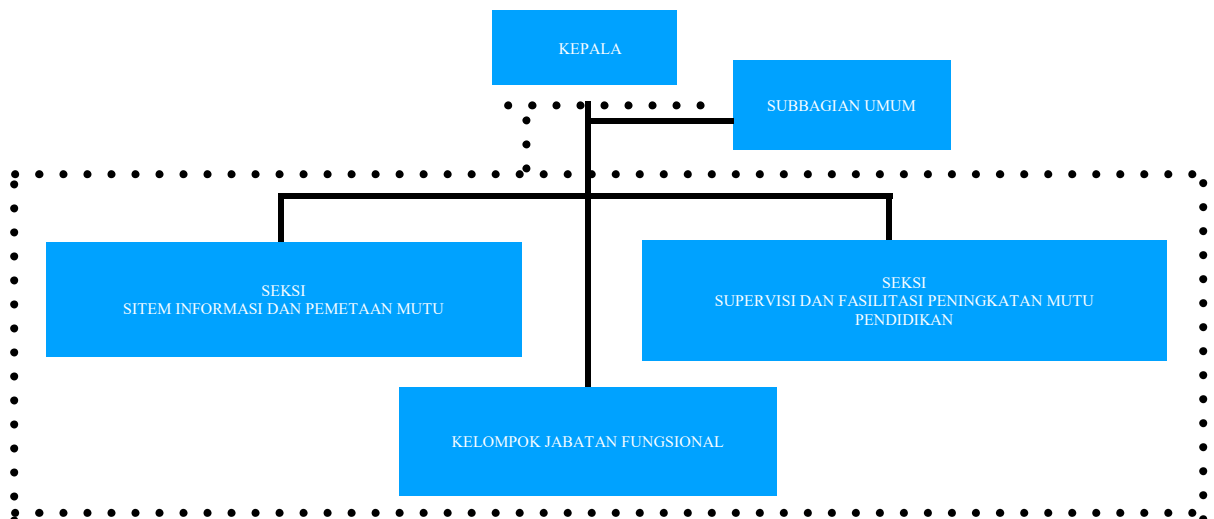
## **B. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan adalah perangkat LPMP Kalimantan Utara yang meliputi struktur organisasi dan proses bisnis yang menggambarkan alur aktifitas di LPMP dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kerangka kelembagaan ini disusun dengan tujuan:

1. meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk pencapaian dan visi/misi lembaga;
2. membangun sistem internal yang dapat menjamin keterlaksanaan setiap program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya LPMP Kalimantan Utara

Pada periode pembangunan 2018-2019, LPMP Kalimantan Utara akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara.

Struktur organisasi LPMP Kalimantan Utara Tahun 2018-2019 ditunjukkan pada gambar berikut:

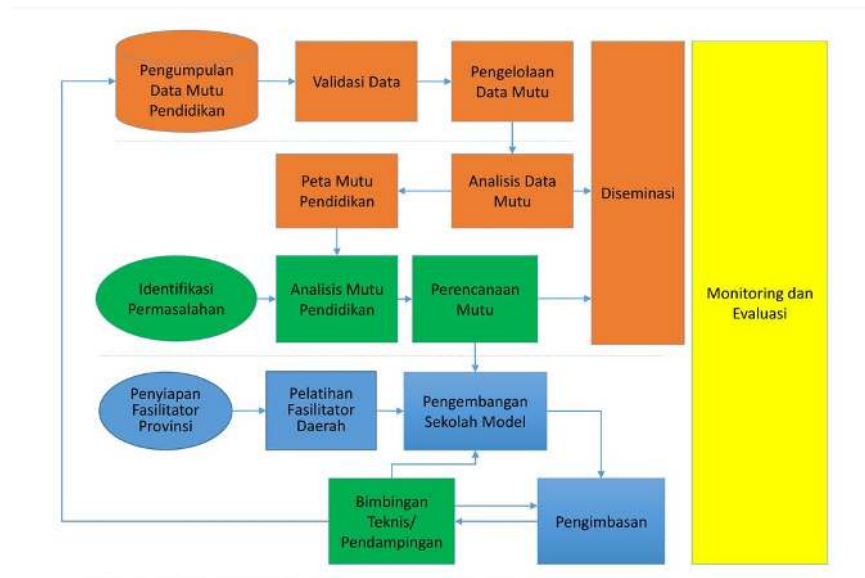


**Bagan 3.1. Struktur Organisasi LPMP Kalimantan Utara**



LPMP kaltara dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

LPMP Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan fungsi dan tugasnya, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum dalam bagan berikut ini:



**Bagan 3.3. Proses bisnis LPMP Kalimantan Utara berdasarkan tugas dan fungsinya**

Berdasarkan ketiga bagan di atas, LPMP memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan proses penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan, yang dimulai dari alur peta mutu dan pemetaan mutu yang menghasilkan rapor mutu, penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal di satuan pendidikan dan melakukan supervisi dan fasilitasi pencapaian dan pemenuhan 8 SNP serta ikut serta dalam memfasilitasi penyelenggaraan kurikulum 2013. Secara struktur sistem dan koordinasi kelembagaan penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat pada skema berikut:



**Bagan 3.4. Bagan sistem dan koordinasi kelembagaan penjaminan mutu pendidikan**

## BAB IV TARGET DAN INDIKATOR KINERJA LPMP KALIMANTAN UTARA

### A. Target dan Indikator Kinerja

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat kementerian, program, dan kegiatan dalam periode 2015—2019. Oleh karena itu Kemendikbud dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP dan IKK).
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, LPMP Kalimantan Utara merujuk pada sasaran program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang memuat dan sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP, yaitu;

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
2. Pengembangan dan pengelolaan sisten informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
4. Fasilitas peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
5. Pelaksanaan kerjasama dibidang penjaminan mutu pendidikan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

Target kinerja yang dimaksud mengacu pada tugas dan fungsi LPMP Kalimantan Utara seperti yang diuraikan diatas, berdasarkan target sasaran strategis Kemendikbud, maka target kinerja LPMP Kalimantan Utara dijelaskan sebagai berikut;

1. T.1: Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan

pendidikan, berkaitan dengan T.1 Kemendikbud, maka sasaran strategis yang disusun;

Kode	Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Awal (2017)	2018	2019
SS.1	Meningkatnya peran pengawas, kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di satuan pendidikan	Orang	50	75	80
IKS.1	Persentase jumlah Pengawas, Kepala sekolah dan Guru yang terlibat dalam pelaksanaan penjaminan mutu	%	25	50	75
IKS.2	Persentase jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan penjaminan mutu pendidikan	%	20	45	60
IKS.3	Indeks efektivitas pengawas, kepada sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan mutu pendidikan	%	0	10	15

2. T.2: Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil, diturunkan dari T.3 Kemendikbud, dengan sasaran strategis termuat dalam tabel berikut;

Kode	Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Awal (2017)	2018	2019
SS.2	Meningkatnya akses layanan mutu pada satuan pendidikan di daerah 3 T	satpend	0	25	50
IKS.1	Persentase satuan pendidikan terpetakan layanan mutu dalam pencapaian 8 SNP	%	0	25	60
IKS.2	Indeks efektivitas terpetakannya layanan mutu dalam pencapaian 8 SNP	%	0	10	15

3. T.3: Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu dengan Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi, diturunkan dari T.4 Kemendikbud, diuraikan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Awal (2017)	2018	2019
SS.3	Meningkatnya pembelajaran yang bermutu melalui layanan penjaminan mutu	Satpend	540	600	724
IKS.1	Persentase satuan pendidikan yang tersupervisi berdasarkan 8 SNP	%	25	50	100
IKS.2	Indeks efektivitas satuan pendidikan yang tersupervisi berdasarkan 8 SNP	%	0	10	20
IKS.3	Persentase satuan pendidikan yang terfasilitasi berdasarkan 8 SNP	%	25	50	100
IKS.4	Indeks efektivitas satuan pendidikan yang terfasilitasi berdasarkan 8 SNP	%	0	10	25

4. T.4: Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan, diturunkan dari T.6. Kemendikbud, dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Awal (2017)	2018	2019
SS.4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja lembaga	opini	0	Memuaskan	Memuaskan
IKS.1	Skor SAKIP LPMP Kalimantan Utara	angka	0	78	79
SS.5	Menuju Opini lembaga wilayah bebas dari korupsi (WBK)	opini	0	WBK	WBK
IKS.2	Laporan kinerja lembaga yang memenuhi opini WBK	angka	0	42	70
SS.5	Meningkatnya layanan publik dalam data dan informasi mutu pendidikan	layanan	0	92	95
IKS.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan data dan informasi sebesar 60	Angka	0	50	60

### Target Kinerja Sasaran Program (SS)

Keberhasilan Sasaran strategi/sasaran program tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja LPMP Kalimantan Utara mengacu pada target capaian kinerja sesuai yang tertuang dalam matriks kinerja Kemendikbud yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Dikdasmen yang secara eksplisit dilegalkan dalam Permendikbud 12 tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019. Target kinerja LPMP Kalimantan Utara sesuai yang diamanahkan dalam bentuk ketercapaian indikator kinerja kegiatan sesuai indikator kinerja program Direktorat Dikdasmen sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN		
				2017	2018	2019
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Sekolah	721	736	1290	1150
1.1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	%	0	85	86	84.38
1.2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	86	87	88.75
1.3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	%	0	85	86	98.53
1.4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	86	87	96.31
1.5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	%	0	85	86	95.76
1.6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	86	87	99.50
1.7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	%	0	85	86	99.78
1.8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	86	87	88.75

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN		
				2017	2018	2019
2	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan melalui supervisi dan fasilitasi pelaksanaan SNP (kurikulum 2013)	Sekolah	721	736	743	743
2.1	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui pelaksanaan kurikulum 2013	%	0	85	86	88.5
2.2	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui pelaksanaan kurikulum 2013	%	0	86	87	89.6
2.3	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui pelaksanaan kurikulum 2013	%	0	85	86	88.5
2.4	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui pelaksanaan kurikulum 2013	%	0	86	87	89.6
3	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan melalui pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dan fasilitasi berdasarkan 8 SNP	Sekolah	0	20	100	55
3.1	Persentase SD yang difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui model PMP	%	0	88.9	98.6	98.8
3.2	Persentase SMP yang difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui model PMP	%	0	87.9	97.5	98
3.3	Persentase SMA yang difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui model PMP	%	0	86.7	96.4	98
3.4	Persentase SMK yang difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui model PMP	%	0	85.7	95.7	98
4	Meningkatnya Penjaminan Mutu pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah melalui kemitraan penjaminan mutu pendidikan	Program	0	0	1	1
5	Meningkatnya Penjaminan Mutu pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan Dasar dan	Sekolah	0	0	0	654

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN		
				2017	2018	2019
	Menengah melalui verifikasi mutu pendidikan					
5.1	persentase satuan pendidikan yang terverifikasi mutu pendidikannya	%	0	0	0	95.7
6	Tersedianya sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah	Layanan			1	1
6.1	Jumlah layanan sistem data dan informasi penjaminan mutu pendidikan	%	0	0	88.7	98.5
7	Terwujudnya tata kelola LPMP Kalimantan Utara yang baik	Layanan			1	1
7.1	Layanan administrasi yang tersistematis dan terbuka	%	0	0	86.7	96.5
7.2	Nilai Minimal SAKIP LPMP Kalimantan Utara	Nilai	0	0	78	79

## B. Penilaian Kinerja

LPMP Kalimantan Utara berdiri dan beroperasi secara aktif sesuai dengan tahun anggaran, dimulai dalam Tahun 2018 dengan DIPA Tahun Anggaran 2018. Penilaian kinerja yang direncanakan dalam rencana strategis 2015 - 2019 disesuaikan dengan target dan indikator kinerja dalam renstra LPMP Kalimantan Utara sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target Capaian		Target Anggaran*)	
				2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di sekolah jenjang pendidikan	Melalui satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya	Sekolah	724	1290	1150		
	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	65	85		
	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	65	85		
	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	65	85		
	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	65	85		
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013	Sekolah	724	736	743		
	SD yang telah terpetakan mutunya	%	90.5	91	95		
	SD yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	74	95		
	SMP yang telah dipetakan mutunya	%	71.48	75	80		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target Capaian		Target Anggaran*)	
				2018	2019	2018	2019
	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	80	95		
	SMA yang telah dipetakan mutunya	%	71.41	75	80		
	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	80	90		
	SMK yang telah dipetakan mutunya	%	59.6	65	78		
	SMK yang meningkat efektivitasnya	%	0	70	95		
Tersedianya sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah - <i>Jumlah layanan sistem data dan informasi penjaminan mutu pendidikan</i>		layanan		1	1		
Terwujudnya tata kelola LPMP Kalimantan Utara yang baik - <i>Layanan administrasi yang tersistematis dan terbuka</i>		layanan		12	12		
Nilai Minimal SAKIP LPMP Kalimantan Utara - <i>terwujudnya nilai minimal SAKIP LPMP Kalimantan Utara</i>		Nilai		78	80		
<p>*) dalam ribuan rupiah  **) berdasarkan kebijakan baru kementerian pendidikan dan kebudayaan dan program pemerataan pendidikan di daerah terpencil, terluar dan perbatasan.</p>							

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitasi pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis LPMP Kalimantan Utara tahun 2018-2019 yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan tahunan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yaitu, tahun 2018 sampai 2019.

Di dalam Rencana Strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh LPMP Kalimantan Utara pada kurun waktu 2018-2019. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan (1) Pemetaan mutu pendidikan; (2) Supervisi dalam pencapaian standar nasional pendidikan; (3) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan; yang terintegrasi dalam satu sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan dalam pemberian layanan penjaminan mutu pendidikan.

Seluruh kegiatan LPMP Kalimantan Utara harus tetap terarah dan terencana, baik dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Hak terhadap pelayanan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas harus dipenuhi. Kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan harus ditingkatkan. Peningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan perlu diupayakan dengan optimal. Rencana strategis LPMP Kalimantan Utara tahun 2018-2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan kelembagaan di LPMP Kalimantan Utara untuk memastikan arah kegiatan dan kebijakan pengelolaan LPMP Kalimantan Utara selaras dengan arah kebijakan dan pengelolaan direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- A. Matrik Kinerja Tahun 2015-2019 LPMP Kalimantan Utara
- B. Matrik Pendanaan Tahun 2015 - 2019 LPMP Kalimantan Utara

# Lampiran A

**Matrik Kinerja Tahun 2015-2019 LPMP Kalimantan Utara**

MATRIK KINERJA LPMK KALIMANTAN UTARA

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
1	Mewujudkan Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berstandar Moral dan Berkinerja Tinggi	Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan pendidikan	meningkatnya peran pengawas, kepala sekolah, guru dan siswa dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah	terwujudnya pengawas, kepala sekolah, guru dan siswa yang berperan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah	90 % pengawas, kepala sekolah, guru dan siswa berperan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan	Peningkatan Layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya Satuan pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	persentase satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya persentase satuan pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	sekolah yang terverifikasi dan terpetakan data mutunya sekolah yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	jumlah sekolah yang terverifikasi dan terpetakan data mutunya jumlah sekolah yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	persentase sekolah yang terverifikasi dan terpetakan mutu pendidikannya persentase sekolah yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP
		Peningkatan Akses Penjaminan	meningkatkan	terwujudnya	100 %	peningkatan	satuan pendidikan yang terverifikasi mutu pendidikannya satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya	persentase satuan pendidikan yang terverifikasi mutu pendidikannya persentase satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya	Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 supervise implementasi SPMI sekolah model wilayah perbatasan	jumlah sekolah yang terverifikasi melaksanakan kurikulum 2013 jumlah sekolah model di wilayah perbatasan	persentase sekolah yang terverifikasi melaksanakan kurikulum 2013 persentase sekolah model yang terverifikasi di wilayah perbatasan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
2	Meningkatkan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil	meningkatkan layanan akses penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang menyentuh daerah 3T	Jangkauan dan jumlah layanan akses penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di daerah 3T	60% daerah 3T mendapatkan layanan akses penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah	Peningkatan Layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	satuan pendidikan yang disupervisi dan difasilitasi pencapaian SNP	persentase satuan pendidikan yang tersupervisi dan difasilitasi pencapaian SNP	Penguatan SPMI pada sekolah model dan sekolah imbas di wilayah perbatasan	jumlah sekolah model dan sekolah imbas yang difasilitasi melalui kemitraan	persentase sekolah model dan sekolah imbas yang diberikan penguatan SPMI
3	Meningkatkan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk menuju pendidikan dasar dan menengah yang berbudaya mutu	Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi	meningkatkan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi	terwujudnya layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi	85% layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi	Peningkatan layanan dukungan manajemen penjaminan mutu pendidikan melalui data dan informasi	Data dan informasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang tersampaikan kepada stakeholder	persentase data dan informasi penjaminan mutu pendidikan yang tersampaikan ke stakeholder	Pengelolaan data dan informasi	jumlah stakeholder yang tersampaikan data dan informasi penjaminan mutu pendidikan	persentase data dan informasi penjaminan mutu pendidikan yang tersampaikan ke stakeholder

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
4	Meningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan	meningkatnya tata kelola dan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan	terwujudnya tata kelola dan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan	tata kelola dan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dan mendapatkan WBK	Peningkatan layanan dukungan manajemen dan layanan perkantoran	tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan  tersusunnya laporan perencanaan yang transparan dan terencana dengan sistematis  terlaksananya peneregakan zona integritas dan wilayah bebas korupsi	nilai LAKIP yang mencapai B dan laporan keuangan yang terselesaikan 95%  nilai capaian pelaksanaan kegiatan dengan ketuntasan 95%	Pelaksanaan penyusunan LAKIP, SAKIP dan Review rensra dan laporan keuangan SAI, SIMAK dan SIMAN  Pelaksanaan penyusunan RKAKL dan review RKAKL	LAKIP, SAKIP dan Review rensra dan laporan keuangan SAI, SIMAK dan SIMAN yang tersusun sesuai format  RKAKL dan review RKAKL yang terbuka dan tersistematis	persentase penyelesaian LAKIP, SAKIP dan Review rensra dan laporan keuangan yang sesuai jadwal  persentase penyelesaian RKAKL dan review RKAKL  Lembaga yang melaksanakan penerapan ZI-WBK

Jember, 14 September 2019  
Kepala LPMP Kalimantan Utara



Dr. Jarwoko, M.Pd  
NIP.197003191997031001

# Lampiran B

**Matrik Pendanaan Tahun 2015-2019 LPMP Kalimantan Utara**

MATRIK PENDANAAN LPMP KALIMANTAN UTARA

Kode Unit Kerja : 417653 (LPMP Kalimantan Utara)

NO	PROGRAM	OUTPUT PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	BASELINE	TARGET KINERJA		RENCANA ANGGARAN	
						TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Peningkatan layanan pengembangan PMP untuk seluruh jenjang pendidikan	Satpend yang terpetakan mutu pendidikannya (5630.001)	736	1290	1150	696,294,000	927,606,000
				Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	736	100	55	3,886,073,000	9,166,908,000
				Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013	736	1118	1150	6,370,478,000	1,211,728,000
				Satuan Pendidikan yang terverifikasi mutu pendidikannya	736	645	645	937,287,000	1,521,887,000

Kode Unit Kerja : 417653 (LPMP Kalimantan Utara)

NO	PROGRAM	OUTPUT PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	BASELINE	TARGET KINERJA		RENCANA ANGGARAN	
						TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2018	TAHUN 2019
			Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	Layanan dukungan management eselon I	12	1	1	1,970,159,000	2,298,859,000
				Layanan internal	12	12	12	1,622,646,000	273,000,000
				Layanan perkantoran	12	12	12	3,623,077,000	3,411,140,000
								19,106,014,000	18,811,128,000

